

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KELOMPOK
WANITA TANI DI JORONG PULAU AIR BARAT NAGARI
TANDIKAT KECAMATAN PATAMUAN KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

**Community Empowerment through Women's Farming Groups
in Jorong Pulau Air Barat, Nagari Tandikat, Patamuan District,
Padang Pariaman Regency**

Adellia Putri & Dasman Lanin

Universitas Negri Padang
adelliaputri0819@gmail.com

Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:

Sep 14, 2025 Oct 6, 2025 Oct 18, 2025 Oct 23, 2025

Abstract

Community empowerment, particularly of rural women, plays a vital role in enhancing both economic and social well-being. However, limited access to resources, training, and markets remains a key obstacle to fully realizing the potential of women farmers. This study aims to analyze the implementation of community empowerment through *Kelompok Wanita Tani* (KWT, or Women Farmers' Groups) in Jorong Pulau Air Barat, Nagari Tandikat, Patamuan Subdistrict, Padang Pariaman Regency, by examining three main aspects: enabling (creating supportive conditions), empowering (strengthening capacity and participation), and protecting (safeguarding institutional sustainability and social solidarity). A qualitative descriptive method was employed, with data collected through observation, in-depth interviews with KWT members and village officials, and documentation of group activities. The findings reveal that the

enabling aspect has been implemented through local government support and recognition, although challenges remain in post-harvest facilities and market access. The empowering aspect is reflected in improved skills, confidence, and member participation following training programs. The protecting aspect is manifested through internal group regulations, regular mentoring, and social solidarity that sustains institutional resilience. These findings affirm that group-based empowerment through KWT significantly contributes to strengthening the economic independence of rural women and reinforcing the social fabric of local communities.

Keywords: Women's Empowerment; Women Farmers' Group; Economic Independence; Community Participation; Rural Areas

Abstrak: Pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan di pedesaan, memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Namun, keterbatasan akses terhadap sumber daya, pelatihan, dan pasar masih menjadi hambatan dalam mengoptimalkan potensi perempuan tani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) di Jorong Pulau Air Barat, Nagari Tandikat, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, dengan meninjau tiga aspek utama: *enabling* (penciptaan kondisi pendukung), *empowering* (penguatan kapasitas dan partisipasi), serta *protecting* (perlindungan terhadap keberlanjutan kelembagaan dan solidaritas sosial). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan anggota KWT dan aparat pemerintah nagari, serta dokumentasi aktivitas kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek *enabling* telah berjalan melalui dukungan dan pengakuan pemerintah lokal, meskipun masih terdapat kendala dalam fasilitas pascapanen dan pemasaran. Aspek *empowering* tercermin dari peningkatan keterampilan, kepercayaan diri, dan partisipasi anggota pascapelatihan. Adapun aspek *protecting* diwujudkan melalui aturan internal kelompok, pendampingan rutin, serta solidaritas sosial yang mendukung keberlanjutan kelembagaan. Temuan ini menegaskan bahwa pemberdayaan berbasis kelompok melalui KWT berkontribusi signifikan dalam memperkuat kemandirian ekonomi perempuan pedesaan dan memperkuat struktur sosial komunitas lokal.

Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan; Kelompok Wanita Tani; Kemandirian Ekonomi; Partisipasi Masyarakat; Pedesaan.

PENDAHULUAN

Pemerintah menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu strategi pembangunan nasional. Pemberdayaan dimaknai sebagai upaya meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, baik melalui peningkatan pendidikan, keterampilan, maupun akses terhadap sumber daya dan kelembagaan (Suharto, 2021). Dalam konteks pertanian, pemberdayaan petani memiliki dasar hukum yang kuat, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Regulasi ini menegaskan pentingnya pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penguatan kelembagaan, serta perluasan akses pasar. Salah satu bentuk nyata kelembagaan yang lahir dari semangat pemberdayaan adalah Kelompok Wanita Tani (KWT), yaitu wadah perempuan di pedesaan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pertanian. Melalui KWT, perempuan tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam menjaga ketahanan pangan keluarga dan meningkatkan kemandirian ekonomi.

Fenomena tersebut dapat dilihat di Nagari Tandikat, Kabupaten Padang Pariaman, di mana 72% penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Namun, hanya sebagian kecil perempuan sekitar 23% yang tergabung dalam KWT, sementara lainnya masih bertani secara subsisten (DPPPA Padang Pariaman, 2022). Untuk memperkuat peran perempuan, pemerintah nagari mendorong terbentuknya beberapa KWT, yaitu

Tabel 1. Daftar KWT Jorong Pulau Air Barat Nagari Tandikat

No	Nama Kelompok Wanita Tani	Budidaya/Ternak
1.	Belimbing Jaya	Jagung, Sereh
2.	Palak Manduo	Tomat, Cabe, Kambing
3.	Durian Sipinang	Pare, Cabe

Sumber: Kelompok Wanita Tani Nagari Tandikat, 2025

Dari table 1 diatas bahwa, Durian Sipinang, Belimbing Jaya, dan Palak Manduo. Kelompok-kelompok ini bergerak di bidang hortikultura dan peternakan, sekaligus mendapatkan dukungan berupa bibit, benih, dan sarana produksi dari dinas pertanian. Kehadiran KWT membawa dampak positif, baik berupa peningkatan pendapatan rumah tangga maupun terciptanya solidaritas sosial di kalangan anggota. Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, mulai dari keterbatasan akses pemasaran, rendahnya pemahaman digital, hingga minimnya partisipasi anggota dalam manajemen kelompok. Situasi ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan belum optimal. Berbeda dengan KWT Lestari di Sleman, yang berhasil maju berkat dukungan intensif pemerintah daerah, akses pasar daring, dan pengembangan produk olahan (Hapsari et al., 2025), KWT di Nagari Tandikat cenderung berjalan sporadis dan belum terintegrasi dalam sistem pemberdayaan berkelanjutan.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari akses distribusi dan pasar yang terbatas, partisipasi anggota yang belum merata dalam pengambilan keputusan,

hingga perlindungan kelembagaan yang belum optimal bagi keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai dinamika pemberdayaan KWT, khususnya terkait Meciptakan akses, penguatan kapasistas dan partisipas serta bentuk perlindungan. Atas dasar itu, penelitian ini berjudul Analisis Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani di Jorong Pualau Air Barat, Nagari Tandikat, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang meliputi aspek *enabling* (penciptaan kondisi yang mendukung pengembangan potensi pertanian lokal dan akses pasar), *empowering* (penguatan kapasitas dan partisipasi anggota kelompok), serta *protecting* (perlindungan terhadap keberlanjutan kelembagaan kelompok dan solidaritas sosial) berdasarkan proses pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) di Jorong Pulau Air Barat, Nagari Tandikat, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam proses pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) di Jorong Pulau Air Barat, Nagari Tandikat, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali fenomena sosial secara kontekstual, terutama mengenai bagaimana perempuan di pedesaan berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pertanian. Menurut (Abdussamad, 2021), penelitian kualitatif berfokus pada makna yang muncul dari pengalaman subjek penelitian dalam konteks kehidupan nyata. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya memahami proses pemberdayaan yang mencakup tiga aspek utama, yaitu penciptaan potensi berkembang, penguatan kapasitas individu dan kelompok, serta perlindungan terhadap keberlanjutan kegiatan kelompok tani wanita. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan yaitu, Juni sampai Juli 2025.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti ketua KWT, anggota kelompok, perangkat nagari, serta pihak terkait dari Dinas Pertanian. Wawancara dilakukan dengan pedoman pertanyaan terbuka untuk menggali persepsi, pengalaman, dan kendala yang dihadapi oleh anggota kelompok (Hardani et al., 2020). Sedangkan data sekunder berasal dari berbagai dokumen resmi, seperti

laporan kegiatan, arsip kelembagaan, foto dokumentasi, dan publikasi pemerintah daerah yang relevan dengan kegiatan pemberdayaan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen (Lexy J Moleong, 2019). Triangulasi ini bertujuan memastikan bahwa informasi yang diperoleh memiliki tingkat validitas tinggi, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bentuk dan dampak pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kelompok Wanita Tani di wilayah penelitian. Analisis yang digunakan adalah menggunakan (Matthew B Miles, A Michael Huberman, 2020) yang meliputi tiga hal yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

HASIL

Upaya Menciptakan Akses Berkembang bagi KWT di Jorong Pulau Air Barat

Uraian ini disusun berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah nagari, perangkat jorong, pengurus dan anggota KWT, serta masyarakat sekitar yang terlibat dalam proses pemberdayaan.

a. Kebijakan Pemerintah Nagari dan Jorong dalam Penciptaan Lingkungan Kondusif

Pemerintah nagari dan jorong memainkan peran sentral dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pemberdayaan perempuan di bidang pertanian. Pemerintah Nagari Tandikek menunjukkan komitmennya melalui penyuluhan rutin, pemberian bantuan bibit tanaman dan ternak, serta legalisasi KWT melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Nagari. Selain itu, pemerintah jorong turut mendukung dalam pendampingan administratif serta mendorong partisipasi perempuan melalui kegiatan sosial dan musyawarah masyarakat. Hasil wawancara dengan Wali Nagari Tandikek menunjukkan bahwa:

“Kami mendukung penuh kegiatan KWT karena ini bagian dari upaya meningkatkan ekonomi keluarga. Pemerintah nagari memberikan bantuan bibit dan penyuluhan agar ibu-ibu bisa mandiri dan tidak hanya bergantung pada penghasilan suami.”

b. Fasilitasi Akses terhadap Sumber Daya dan Jaringan

Akses terhadap sumber daya dan jaringan menjadi faktor penting dalam memperkuat eksistensi KWT. Pemerintah nagari berperan sebagai penghubung antara kelompok tani dengan lembaga eksternal, seperti Dinas Pertanian, penyuluh lapangan, dan lembaga keuangan mikro. Melalui dukungan administratif dan teknis, anggota KWT memperoleh

bantuan berupa bibit, alat pertanian, serta pelatihan keterampilan. Salah satu anggota KWT yang berusia 42 tahun mengungkapkan:

“Kami dibantu nagari untuk ikut pelatihan membuat pupuk organik. Hasilnya lumayan, sekarang kami bisa pakai sendiri dan jual ke masyarakat sekitar.”

c. Peran Aktif Ketua dan Anggota dalam Menciptakan Peluang

Selain dukungan eksternal, peran internal kelompok menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan. Ketua KWT memiliki tanggung jawab dalam memotivasi anggota, mengatur jadwal kegiatan, serta menjaga kekompakan kelompok. Melalui gotong royong dan pembagian tugas, kegiatan seperti menanam sayur, beternak ayam, dan mengelola hasil panen dapat berjalan berkelanjutan. Ketua KWT, menuturkan:

“Kami tidak menunggu bantuan, tapi berusaha dulu dengan apa yang ada. Kalau ada program pemerintah, itu jadi tambahan semangat bagi kami.”

d. Hambatan dalam Menciptakan Akses Berkembang

Proses pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik struktural maupun internal. Pada tahap *enabling*, hambatan muncul dalam bentuk keterbatasan sumber daya, alat pascapanen, dan akses pasar. Di Nagari Tandikek, kegiatan KWT masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya terfokus pada peningkatan produktivitas. Meski demikian, semangat partisipatif anggota menjadi kekuatan utama dalam menjaga keberlanjutan kelompok. Melalui kegiatan rutin seperti perawatan tanaman dan penjualan hasil panen, KWT memberikan manfaat ekonomi sekaligus memperkuat solidaritas sosial. Dengan dukungan kebijakan dan pendampingan teknis yang konsisten, KWT berpotensi tumbuh sebagai penggerak ekonomi lokal yang mandiri.

Tabel 2. Ringkasan Temuan Lapangan tentang Upaya Menciptakan Akses Berkembang bagi KWT di Jorong Pulau Air Barat

Aspek	Bentuk Kegiatan / Dukungan	Pelaksana / Pihak Terlibat	Dampak terhadap KWT
Kebijakan dan Dukungan Pemerintah	Penerbitan SK KWT, penyuluhan, bantuan bibit	Pemerintah Nagari & Jorong	Legalitas kelompok meningkat dan akses bantuan terbuka
Fasilitasi Sumber Daya dan Jaringan	Pelatihan pupuk organik, bantuan ternak, akses pasar lokal	Nagari, Dinas Pertanian, Penyuluh	Peningkatan keterampilan dan pendapatan anggota

Aspek	Bentuk Kegiatan / Dukungan	Pelaksana / Pihak Terlibat	Dampak terhadap KWT
Peran Internal Kelompok	Gotong royong, pembagian tugas, penanaman sayur, ternak ayam	Ketua & Anggota KWT	Kemandirian meningkat dan solidaritas sosial terbangun
Hambatan dan Tantangan	Keterbatasan alat, akses pasar lemah, peran ganda perempuan	Anggota & Pemerintah Lokal	Produktivitas belum maksimal, perlu pendampingan berkelanjutan

Berdasarkan tabel 2 di atas, upaya menciptakan akses berkembang bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) di Jorong Pulau Air Barat dilakukan melalui sinergi antara pemerintah nagari, penyuluh pertanian, dan anggota kelompok. Pemerintah memberikan dukungan kebijakan berupa penerbitan SK kelompok, penyuluhan, serta bantuan bibit dan ternak yang memperkuat legalitas serta membuka akses terhadap berbagai program bantuan. Di sisi lain, pelatihan dan pendampingan teknis seperti pembuatan pupuk organik dan pengelolaan pasar lokal meningkatkan keterampilan sekaligus pendapatan anggota.

Penguatan Kapasitas dan Partisipasi KWT di Jorong Pulau Air Barat

Dalam pemberdayaan masyarakat, aspek *empowering* berfokus pada peningkatan kapasitas agar individu mampu mengelola sumber daya, mengambil keputusan, dan hidup mandiri. Upaya ini meliputi pelatihan, akses modal, dan pendampingan teknis untuk memperkuat keterampilan praktis, kepercayaan diri, serta partisipasi aktif, terutama bagi perempuan. Di Jorong Pulau Air Barat, penguatan dilakukan melalui bimbingan pemerintah, penyuluhan, dan sistem kelompok yang menumbuhkan solidaritas, tanggung jawab bersama, serta kemandirian dalam mengelola kegiatan produktif KWT. terdapat empat hal utama yaitu: Pertama, bentuk pelatihan dan pendampingan kapsitas. Peningkatan kapasitas menjadi fondasi utama dalam penguatan KWT di Nagari Tandikek. Pemerintah nagari bekerja sama dengan penyuluh pertanian untuk melaksanakan pelatihan teknis dan pendampingan berkelanjutan, terutama dalam bidang pengolahan pupuk organik, budidaya sayuran, dan pengelolaan ternak kecil. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab dan solidaritas di antara anggota. Hasil wawancara dengan Penyuluh Pertanian Lapangan mengungkapkan:

“Kami rutin mengadakan pelatihan pembuatan pupuk organik dan budidaya tanaman. Tujuannya agar ibu-ibu tidak hanya menanam, tapi juga tahu bagaimana mengelola hasilnya supaya berkelanjutan.”

Kedua, Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan dan Kegiatan Kolektif. Partisipasi aktif menjadi ciri khas kegiatan KWT di Nagari Tandikek. Anggota kelompok secara rutin mengikuti rapat bulanan, musyawarah kelompok, dan pengelolaan keuangan bersama. Melalui forum ini, perempuan memperoleh ruang untuk menyampaikan pendapat, menentukan rencana kerja, serta mengelola dana kas dan hasil penjualan kelompok secara transparan. Ketua KWT, menjelaskan:

“Setiap keputusan kami ambil bersama. Kalau ada bantuan, pelatihan, atau masalah keuangan, semua dibahas di rapat. Jadi tidak ada yang merasa tertinggal.”

Ketiga, kemandirian dan kepercayaan diri anggota setelah terlibat KWT. Keberhasilan pemberdayaan perempuan melalui KWT di Nagari Tandikek tidak hanya terlihat dari peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga perubahan psikologis dan sosial anggota. Melalui partisipasi aktif, perempuan menjadi lebih percaya diri, mandiri, dan berani mengambil keputusan. Aktivitas seperti rapat, pemasaran hasil panen, serta beternak menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemampuan berkontribusi pada ekonomi keluarga. Transformasi ini memperlihatkan bahwa KWT berfungsi sebagai ruang belajar dan dukungan sosial yang efektif dalam memperkuat peran perempuan sebagai pelaku aktif pembangunan masyarakat.

Dan Keempat, strategi ketua dalam meningkatkan kekompakan dan inisiatif. Dimana kepemimpinan ketua KWT di Nagari Tandikek berperan penting dalam menjaga kekompakan dan semangat anggota melalui pendekatan komunikatif dan inklusif. Melalui pengelolaan kas, kegiatan bersama, serta dorongan kemandirian, para ketua mampu menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif, menjadikan KWT ruang pemberdayaan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Bentuk Perlindungan terhadap Keberlanjutan KWT di Jorong Pulau Air Barat

Bentuk Perlindungan terhadap Keberlanjutan KWT di Jorong Pulau Air Barat terdapat tiga hal yang meliputi: Pertama, perlindungan terhadap risiko usaha dan ketidakpastian program. Dimana dalam perlindungan dalam pemberdayaan kelompok wanita tani di Nagari Tandikek berfokus pada mitigasi risiko usaha dan sosial melalui pendampingan teknis serta penguatan kapasitas manajerial. Pemerintah nagari berperan dalam penyuluhan

dan perencanaan partisipatif, sementara jorong memberikan perlindungan berbasis solidaritas sosial. Namun, keterbatasan akses pasar dan ketidakteraturan partisipasi masih menjadi tantangan yang memerlukan sinergi kebijakan untuk memperkuat ketahanan kelompok secara berkelanjutan.

Kedua, aturan internal dan ketertiban kelompok. Dimana Aturan internal dalam KWT di Nagari Tandikek berperan penting menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan tanggung jawab anggota. Melalui sistem iuran dan denda, kelompok berupaya menumbuhkan komitmen serta melindungi keberlangsungan kegiatan. Namun, penerapan aturan belum sepenuhnya efektif karena masih kurangnya kesadaran dan konsistensi anggota. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis edukasi, komunikasi terbuka, dan penguatan nilai kebersamaan agar aturan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi sarana memperkuat solidaritas dan keberlanjutan kelompok.

Dan ketiga adalah peran pemerintah dalam menjaga keberlangsungan kegiatan. Dimana keberlangsungan kegiatan KWT di Nagari Tandikek sangat bergantung pada dukungan pemerintah lokal. Pemerintah nagari berperan memperkuat kelembagaan melalui fasilitasi AD/ART dan kemitraan eksternal, sementara pemerintah jorong menjaga keberlanjutan dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Dukungan tidak hanya bersifat material, tetapi juga emosional melalui pendampingan dan perhatian terhadap kelompok. Pendekatan ini mencerminkan peran pemerintah sebagai mitra komunitas yang aktif, memastikan KWT tetap mandiri, berdaya, dan berkelanjutan meski menghadapi keterbatasan sumber daya.

PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) di Jorong Pulau Air Barat merupakan bentuk nyata pembangunan partisipatif yang menempatkan perempuan sebagai subjek utama dalam pengelolaan sumber daya lokal. Berdasarkan teori (Monawar, 2011), pemberdayaan harus dimulai dengan penciptaan lingkungan sosial yang kondusif (enabling), penguatan kapasitas (empowering), dan perlindungan terhadap keberlanjutan (protecting). Dalam konteks ini, peran pemerintah nagari dan jorong menjadi penting sebagai fasilitator yang mengarahkan kelompok perempuan agar mampu berdaya secara ekonomi dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan di KWT Pulau Air Barat telah berlangsung dinamis, dengan dukungan kelembagaan, pelatihan, dan

pendampingan teknis yang konsisten. Upaya tersebut memperlihatkan adanya transformasi dari masyarakat pasif menjadi masyarakat produktif yang berdaya dan mampu mengelola potensi lokal secara mandiri.

Dalam aspek *Enabling*, menurut Munawar Noor, *enabling* merupakan tahap awal dalam proses pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada penciptaan lingkungan kondusif agar masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, mampu berkembang secara mandiri. Tahap ini menekankan pentingnya membangun motivasi, kesadaran, dan kemampuan untuk mengenali serta mengelola potensi sosial, ekonomi, dan budaya yang dimiliki. Dalam konteks Kelompok Wanita Tani (KWT) di Jorong Pulau Air Barat, prinsip *enabling* telah diterapkan melalui dukungan pemerintah nagari dan jorong yang berperan aktif memperkuat kelembagaan kelompok. Bentuk dukungan tersebut antara lain penyusunan regulasi lokal, fasilitasi administrasi, dan pendampingan teknis yang diformalkan melalui Keputusan Wali Nagari Tandikat No. 60 Tahun 2023 (KWT Palak Manduo), No. 37 Tahun 2022 (KWT Durian Sipinang), dan No. 38 Tahun 2022 (KWT Belimbing Jaya) dalam (IPCC, 2021). Langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam pembinaan kelembagaan petani serta amanat peraturan perundang-undangan mengenai peran desa atau nagari dalam pembangunan partisipatif.

Selain dukungan kelembagaan, pemerintah juga berperan sebagai fasilitator melalui penyuluhan pertanian, bantuan bibit, dan pengurusan legalitas kelompok. Sinergi antara pemerintah nagari dan jorong menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi tumbuhnya partisipasi dan solidaritas anggota KWT, sesuai pandangan (Nurhayati & Suryanto, 2021) bahwa pemberdayaan menuntut kolaborasi dan penguatan jaringan sosial. Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa tahap *enabling* masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan alat pascapanen, akses pasar yang sempit, dan keberlanjutan program. Sebagaimana dikemukakan (Mardikanto, 2018; Setiadi & Pradana, 2022), keberhasilan pemberdayaan memerlukan kesinambungan antara penciptaan lingkungan yang mendukung, peningkatan kapasitas, dan pendampingan jangka panjang. Dengan demikian, meskipun KWT di Jorong Pulau Air Barat telah berhasil pada tahap awal, diperlukan strategi lanjutan untuk memperkuat aspek teknis, memperluas jejaring pasar, serta membangun kelembagaan yang tangguh agar kemandirian kelompok dapat tercapai secara berkelanjutan.

Pada aspek, *Empowering*, menurut Munawar Noor, *empowering* merupakan tahap lanjutan dalam proses pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada penguatan kapasitas

individu maupun kelompok agar mampu mengelola sumber daya, membuat keputusan, dan hidup secara mandiri. Dalam konteks Kelompok Wanita Tani (KWT), tahap ini mencakup pelatihan, pendampingan, pemanfaatan teknologi, serta pembentukan sistem internal yang menumbuhkan kemandirian dan keberdayaan kolektif. Di Jorong Pulau Air Barat, proses ini telah berjalan melalui pelatihan teknis seperti pengolahan pupuk kandang dan pembuatan pupuk organik yang difasilitasi pemerintah nagari, jorong, penyuluh pertanian, dan mahasiswa KKN. Pendekatan partisipatif ini memperkuat transfer pengetahuan secara kontekstual dan sejalan dengan prinsip *community-based learning*, sebagaimana ditegaskan (Mardikanto, 2018; Kaseng, 2023) bahwa penguatan kapasitas harus diarahkan pada keterampilan praktis dan inovasi lokal.

Selain penguatan teknis, proses *empowering* juga tampak pada peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, serta kegiatan kolektif. Sistem iuran dan denda tidak hanya menjadi alat pengelolaan kas, tetapi juga membentuk kedisiplinan dan solidaritas antaranggota (Alfi Andriansyah Harahap, 2022). Kepemimpinan partisipatif para ketua KWT turut memperkuat dinamika kelompok melalui motivasi, suasana pertemuan yang inklusif, dan dorongan terhadap kemandirian anggota. Banyak anggota kemudian mengembangkan usaha tani dan ternak secara mandiri di rumah, menandakan keberhasilan transfer pengetahuan dan nilai-nilai pemberdayaan. Dengan demikian, tahap *empowering* di KWT Jorong Pulau Air Barat tidak hanya menghasilkan peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga transformasi psikologis dan sosial yang memperkuat kemandirian perempuan serta posisi mereka sebagai pelaku aktif dalam pembangunan ekonomi berbasis komunitas sebagaimana yang diungkapkan (Mujtahid et al., 2025) tentang pentingnya komunitas yang sesuai arah masyarakat untuk berkemajuan.

Dan terakhir, aspek *protecting*, menurut Munawar Noor, aspek *protecting* dalam pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya perlindungan terhadap keberlanjutan kelompok agar mampu menghadapi berbagai bentuk kerentanan. Perlindungan ini meliputi penguatan kelembagaan, sistem sosial, serta kebijakan yang mencegah penurunan partisipasi dan kegagalan program. Dalam konteks Kelompok Wanita Tani (KWT), aspek ini menjadi krusial untuk mengantisipasi dinamika pasar, risiko produksi, serta ketidakaturan anggota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan di KWT Jorong Pulau Air Barat telah diterapkan melalui penguatan kapasitas manajerial, penyuluhan pertanian, dan perencanaan kegiatan partisipatif yang digerakkan oleh pemerintah nagari dan jorong.

Selain itu, mekanisme sosial berbasis solidaritas turut berperan dalam melindungi keberlanjutan kelompok. Pemerintah jorong dan masyarakat sekitar memberikan dukungan darurat, membantu pemasaran hasil, serta menciptakan jejaring sosial yang berfungsi sebagai *social buffering* dalam menghadapi risiko. Namun, keterbatasan akses pasar dan partisipasi anggota yang belum konsisten masih menjadi hambatan utama. Karena itu, integrasi antara perlindungan kelembagaan dan dukungan ekonomi lokal menjadi kebutuhan mendesak. Sejalan dengan temuan (Hendrickson et al., 2020; Ningrum, 2022), keberlanjutan KWT akan lebih kuat bila didukung oleh pendampingan berkelanjutan, penguatan distribusi hasil, serta perluasan jejaring pasar yang adaptif terhadap perubahan lingkungan sosial-ekonomi.

Implementasi program pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Jorong Pulau Air Barat menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutannya. Keterbatasan alat pascapanen dan akses pasar yang sempit menjadi hambatan utama dalam optimalisasi hasil produksi termasuk bagi pekerja perempuan (FAO, 2020). Selain itu, fluktuasi partisipasi anggota dan keterbatasan sumber daya juga menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih komprehensif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan, termasuk salah satunya adalah pemamfaatan teknologi, karena dengan teknologi akan membuat lebih mudah dan maju (Jazuli et al., 2023).

Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam kegiatan KWT di Jorong Pulau Air Barat dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Penggunaan teknologi dalam pengolahan hasil pertanian dan pemasaran produk dapat membuka akses pasar yang lebih luas (Julvin et al., 2024). Namun, penerapan teknologi memerlukan pelatihan dan pendampingan yang intensif agar anggota kelompok dapat menguasai dan memanfaatkannya secara optimal (Isti'anatul & Syamsul, 2023). Sebagai contoh, penerapan sistem hidroponik sebagai metode budidaya tanaman tanpa tanah telah menunjukkan potensi dalam meningkatkan efisiensi penggunaan lahan dan produksi tanaman yang lebih optimal. Salah satu tujuan utama pemberdayaan KWT adalah meningkatkan kemandirian ekonomi anggota. Melalui kegiatan usaha tani dan peternakan, anggota KWT di Jorong Pulau Air Barat mampu menghasilkan pendapatan tambahan yang meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun, untuk mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan akses yang lebih baik terhadap pasar dan sumber daya lainnya. Penting bagi pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk menyediakan dukungan yang diperlukan agar anggota kelompok dapat mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan (Ramdayanti et al., 2021).

Peran kepemimpinan dalam kelompok juga sangat penting untuk menjaga kekompakan dan semangat anggota. Ketua KWT di Jorong Pulau Air Barat memainkan peran sentral dalam memotivasi anggota, mengorganisir kegiatan, dan menjalin komunikasi dengan pihak luar. Kepemimpinan yang partisipatif dan inklusif dapat memperkuat solidaritas dan rasa tanggung jawab kolektif dalam kelompok. Sebagai contoh, penelitian oleh (Saputro, 2024; Bass & Riggio, 2016) menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan KWT melalui pembinaan dan pelatihan dapat meningkatkan efektivitas kelompok dalam mencapai tujuan mereka

Penguatan kelembagaan KWT melalui penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan pelatihan manajerial penting untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan kelompok. Kelembagaan yang kuat dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan memperkuat posisi tawar kelompok dalam berbagai forum. Selain itu, kelembagaan yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap kelompok. Sebagai contoh, penelitian oleh (Achadiah et al., 2024) menunjukkan bahwa pendekatan penguatan kelembagaan melalui asistensi, fasilitasi, dan promosi dapat meningkatkan kapasitas KWT dalam mengelola usaha mereka. Untuk meningkatkan keberlanjutan KWT di Jorong Pulau Air Barat, diperlukan strategi yang mencakup penguatan kapasitas teknis dan manajerial, perluasan akses pasar, dan pembangunan kelembagaan yang tangguh. Pendampingan berkelanjutan dari pemerintah dan pihak terkait lainnya juga sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program pemberdayaan. Sebagai contoh, penelitian oleh (Hastuti et al., 2023) menunjukkan bahwa strategi penguatan kelembagaan melalui penguatan SDM, pembangunan sarana fisik kelembagaan, dan pengamanan pendanaan dapat meningkatkan efektivitas KWT dalam mencapai tujuan mereka

Selain itu, perlu adanya evaluasi dan perbaikan program secara berkala untuk menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan anggota kelompok. Evaluasi yang dilakukan secara rutin dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah yang muncul dan mencari solusi yang tepat. Sebagai contoh, penelitian oleh (Rahmawati et al., 2022) menunjukkan bahwa evaluasi dan perbaikan program secara berkala dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pemberdayaan KWT. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat menciptakan sinergi yang memperkuat

keberlanjutan program pemberdayaan. Sebagai contoh, penelitian oleh (Ahmad Rizal, 2018) menunjukkan bahwa kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan KWT.

KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas maka disimpulkan bahwa Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Jorong Pulau Air Barat menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat berjalan secara bertahap melalui tiga aspek utama, yaitu enabling, empowering, dan protecting. Tahap enabling berhasil menciptakan lingkungan kondusif melalui dukungan kebijakan pemerintah nagari dan jorong, termasuk penerbitan SK resmi, penyuluhan, dan fasilitasi administrasi. Tahap empowering memperkuat kapasitas anggota melalui pelatihan teknis, pengelolaan keuangan, dan kegiatan kolektif yang meningkatkan kemandirian serta kepercayaan diri perempuan. Sementara itu, tahap protecting menekankan perlindungan keberlanjutan kelompok melalui penguatan kelembagaan, mekanisme sosial berbasis solidaritas, dan dukungan pemerintah. Meskipun terdapat hambatan seperti keterbatasan akses pasar, alat pascapanen, dan fluktuasi partisipasi anggota, keseluruhan proses pemberdayaan telah berhasil meningkatkan kapasitas individu, kohesi sosial, dan kontribusi perempuan terhadap pembangunan ekonomi lokal.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat berbasis kelompok perempuan di desa, khususnya KWT. Hasil penelitian menegaskan bahwa kombinasi dukungan kelembagaan, pelatihan teknis, dan partisipasi aktif anggota dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan kapasitas sosial perempuan secara signifikan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah nagari, jorong, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan kelompok.

Penelitian selanjutnya disarankan 1) mengeksplorasi pengaruh integrasi teknologi tepat guna dan digitalisasi terhadap produktivitas serta akses pasar KWT, sehingga pemberdayaan perempuan dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. 2) Meneliti mekanisme pendanaan alternatif dan jejaring kemitraan dengan sektor swasta atau lembaga non-pemerintah untuk memperkuat keberlanjutan kelompok. 3) Analisis longitudinal juga diperlukan untuk memahami dampak jangka panjang pemberdayaan

terhadap perubahan sosial, psikologis, dan ekonomi anggota KWT, sehingga strategi pemberdayaan dapat lebih terukur, berkelanjutan, dan responsif terhadap tantangan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Achadiyah Rachmawati, Rositawati Indrati, Ike Wanusmawatie, Dahliatul Qosimah, Siti Azizah, & Wati, A. M. (2024). Intensifikasi Pemeliharaan Domba Dengan Pendekatan Sumber Daya Alam Dan Penguatan Kelembagaan Di Desa Besowo Kediri. *PROFICIO*, 6(1), 120–128. <https://doi.org/10.36728/jpf.v6i1.4071>
- Ahmad Rizal, D. (2018). Pemberdayaan Berbasis Kemitraan Antara Pemerintah Dengan Kelompok Tani Tri Tunggal Wonorejo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 1(2), 343. <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.012-07>
- Alfi Andriansyah Harahap. (2022). Denda Keterlambatan Pembayaran Iuran Bpjs Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1), 112–120. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i1.459>
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2016). *Transformational leadership*. Lawrence Erlbaum.
- DPPPA Padang Pariaman. (2022). *Laporan evaluasi program kelompok wanita tani tahun 2022*. Dinas Pertanian.
- FAO. (2020). The Status of Women in Agrifood Systems. *Rome FAO*, 7(11), 19. <https://doi.org/10.4060/ca8786en>
- Hapsari, A. T., Setyowati, R., & Permatasari, P. (2025). Dampak Program Pekarangan Pangan Lestari Anggota KWT Jaya Mandiri Abadi di Kalurahan Tridadi Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman. *AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension*, 49(1), 11. <https://doi.org/10.20961/agritexts.v49i1.94594>
- Hardani, H., Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (1st ed., Vol. 5, Issue 1). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hastuti, D., Parmadi, Junaidi, Haryadi, Hodijah, S., & Heriberta. (2023). Strategi Pengembangan Desa Wisata melalui Penguatan Kelembagaan: Studi Kasus Danau Tangkas. *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 37–48. <https://doi.org/10.53867/jpm.v3i1.88>
- Hendrickson, M. K., Massengale, S. H., & Cantrell, R. (2020). “No money exchanged hands, no bartering took place. But it’s still local produce”: Understanding local food systems in rural areas in the U.S. Heartland. *Journal of Rural Studies*, 78(4), 480–490. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.07.005>
- IPCC. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Cambridge University Press.
- Isti’anatul Mashlahah, & Syamsul Arifin. (2023). Dampak Perkembangan Teknologi Terhadap Perilaku Dan Kehidupan Pemuda Pemudi Di Era Milenial. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan*, 4(2), 9–13. <https://doi.org/10.25299/jpmpip.2023.13167>

- Jazuli, A., Salsabila, A. Y., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2023). The Strategy of the Head of Madrasah in Cultivating Fastabiqul Khoiroth Culture in the State High School Environment in Batu City. *EDHJ Unnusa*, 8(April), 56–65. <https://journal2.unusa.ac.id/index.php/EHDJ/article/view/4849>
- Julvin Saputri Mendrofa, Martirah Warni Zendrato, Nisiyari Halawa, Elias Elwin Zalukhu, & Natalia Kristiani Lase. (2024). Peran Teknologi dalam Meningkatkan Efisiensi Pertanian. *Tumbuhan : Publikasi Ilmu Sosiologi Pertanian Dan Ilmu Kebutanan*, 1(3), 01–12. <https://doi.org/10.62951/tumbuhan.v1i3.111>
- Kaseng, E. S. (2023). Analisis Pendekatan Komunikasi Partisipatif Lembaga Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *JERP: Jurnal Ekonomi Dan Riset Pembangunan*, 1(3), 42. <https://doi.org/10.38194/jerp8i1.143>
- Lexy J Moleong. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mardikanto, B. (2018). *Pemberdayaan masyarakat: Konsep, teori, dan praktik*. Andi Press.
- Matthew B Miles, A Michael Huberman, J. S. (2020). *Qualitative Data Analysis (A Methods Sourcebook)* (Helen Salmon (Ed.)). SAGE Publications.
- Monawar, N. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 219. <https://doi.org/10.20473/civis.9i2.2021.112-125>
- Mujtahid, Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2025). Analisis Peran Komunitas Gubuk Inspirasi Dalam Membantu Mengembangkan Kualitas Pendidikan Dan Skill Pemuda Di Desa Sumberbrantas Kota Batu. *IDENTIK: Jurnal Ekonomi, Pendidikan Dan Teknik*, 2(4), 103–108. <https://sihojournal.com/index.php/identik/article/view/667>
- Ningrum, D. (2022). Sektor Pertanian dan Dampaknya terhadap Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(2), 245–260. <https://ejournaekonomipengangunant.ac.id/index.php/jbie/article/view/9461>
- Nurhayati, S., & Suryanto, T. (2021). Resistensi budaya patriarki dalam pemberdayaan perempuan tani di Jawa Barat. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(2), 112–125. <https://doi.org/10.20473/jsp.v9i2>
- Rahmawati, I., Wahyuni, N. P., Gouvany, A. L., & Fitriya, A. N. (2022). Evaluasi program pemberdayaan masyarakat dalam pembinaan industri rumah tangga oleh Dinas DP3AKB di Kota Cilegon. *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan*, 8(24), 87–94. <http://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/2959>
- Ramdayanti, E., Argenti, G., & Marsingga, P. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 194–201. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1895>
- Saputro, W. A. (2024). Eskalasi Penguatan Kelembagaan pada Kelompok Wani Tani Sejahtera Mandiri. *AMONG*, 1(1), 57. <https://seminar.ustjogja.ac.id/index.php/AMONG/article/view/2674>
- Setiadi, M. B., & Pradana, G. W. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Genilangit (Studi Di Desa Wisata Genilangit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan). *Publika*, 3(2), 881–894. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p881-894>
- Suharto, E. (2021). *Kesejahteraan sosial dalam pembangunan: Konsep dan strategi*. Rajawali Pers.